

FOREST WATCH INDONESIA

Penulis Utama

*Restu Achmaliadi, I.G. Maha Adi,
Y. Martin Hardiono, Hariadi Kartodihardjo, Fachrurrazi
CH. Malley, Dominggus A. Mampiooper, E.G. Togu
Manurung, Abdon Nababan, Lyndon B. Pangkali,
A. Ruwindrijarto, Lisken L.M. Situmorang, Wardiyono.*

Kontributor

*Yasir Al Fatah, Haryanto R. Putro, Bambang Hero
Saharjo, Silverius Oscar Unggul*

Pengumpulan Data, Analisis, dan Pembuatan Peta

Rina Agustine, C.M. Dessy Anggraini, Endarmiyati (Analisis SIG), Ganip Gunawan; Y. Martin Hardiono (Analisis SIG), Albert T. Mulyono, Rainny Natalia, Christian Purba, Dwi Prabowo YS (Analisis SIG), Rudy A. Ranaq, Mardi Minang Sari, Lisken L.M. Situmorang (Koordinator dan supervisi pengumpulan data dan referensi), Wishnu Tirta, Arbi Valentinus, Wardiyono (Program basis data dan pengembangan sistem), Denny Yomaki.

Manajemen dan Administrasi Laporan

*Koordinator: Lisken L.M. Situmorang, Arbi Valentinus,
Muhammad Ridwan*

Pendanaan dan Administrasi, Pengelolaan Finansial: Rina Agustine, E.G. Togu Manurung, Abdon Nababan, Rainny Natalia

Desain & Tata Letak

Wishnu Tirta

Penyunting: Emily Matthews

GLOBAL FOREST WATCH

Penulis Utama

*Charles Victor Barber
Emily Matthews*

Kontributor

*Catherine Plume, David Brown, Timothy H. Brown,
Lisa Curran.*

Pengumpulan Data, Analisis, dan Pembuatan Peta

Liz Selig (Analisis SIG), Susan Minnemeyer (Analisis SIG), Esther Owubah (Analisis SIG).

Produksi Laporan

*Maggie Powell (desain), Sheila Mulvihill
(penyunting)
Hyacinth Billings (koordinator penyunting),*

Cara mengutip laporan ini: FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch



Laporan tentang Keadaan Hutan Indonesia ini adalah hasil karya Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW). FWI mulai dibentuk pada akhir tahun 1997 oleh 20 lembaga swadaya masyarakat untuk berperan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mendorong percepatan proses demokratisasi, khususnya dalam hal alokasi dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. GFW diluncurkan pada tahun 1998 oleh World Resources Institute (WRI) untuk bekerja bersama lembaga swadaya masyarakat dan para pemimpin lokal di negara-negara yang memiliki hutan di seluruh dunia.

Forest Watch Indonesia berupaya untuk mengembangkan kemampuan warga masyarakat yang mandiri dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan data tentang hutan, peta-peta dan berbagai informasi kebijakan yang relevan dengan apa yang sedang terjadi di hutan-hutan Indonesia dan di tengah masyarakat Indonesia yang hidupnya mengandalkan hutan. FWI merupakan organisasi jaringan pemantauan hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia. Tujuan kegiatan yang ingin dicapai FWI adalah membangun transparansi data dan informasi kehutanan di Indonesia melalui penguatan dan penyediaan informasi dan data alternatif sehingga dapat mendorong publik untuk sensitif merespon perkembangan isu-isu kehutanan terkini.

Global Forest Watch berupaya untuk membuat informasi tersedia secara cepat kepada khalayak luas dengan cara menyediakan informasi tentang hutan dan peta-peta secara langsung dan membangun sebuah situs internet (www.globalforestwatch.org) untuk menampilkan berbagai hasil kegiatan dan kerjasama lapangan di Kamerun, Kanada, Cili, Gabon, Indonesia, Rusia, dan Venezuela. Laporan-laporan, peta-peta dan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya akan disediakan untuk dapat dibaca dan disimpan sendiri. Setiap orang yang punya akses ke internet dapat menelaah data GFW dan memberikan kontribusi dengan cara menyediakan informasi atau kajian-kajian secara langsung. Kami berharap agar berbagai hasil karya dan kegiatan akan membawa kepada suatu dialog yang lebih konstruktif antara para pengelola hutan dan pengguna hutan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR	vi
POKOK-POKOK TEMUAN	viii
1. HUTAN-HUTAN INDONESIA: APA YANG DIPERTARUHKAN?	1
1.1 Hutan Tropis Seratus Juta Hektar	1
1.2 Kekayaan Alam yang Sedang Menuju Kepunahan	1
1.3 Masyarakat juga Bergantung pada Hutan	3
1.4 Kayu Merupakan Sumber Pendapatan Pokok Nasional	5
1.5 Menilai Keadaan Hutan	6
1.6 Struktur Laporan	7
2. KONDISI DAN PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN	8
2.1 Tutupan Hutan dan Perubahannya	8
2.2 Kondisi Hutan Sekarang	17
3. DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN	25
3.1 Ikhtisar Dinamika Deforestasi	25
3.2 Ekstraksi Kayu: Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	28
3.3 Ekstraksi Kayu: Pembalakan Ilegal	33
3.4 Hutan Tanaman Industri (HTI)	41
3.5 Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Skala Besar Lainnya	48
3.6 Pertanian Skala Kecil	55
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	61
4.1 Dari Kebakaran yang Normal sampai yang Tidak Normal	61
4.2 Kebakaran Tahun 1982-1983, dan 1994	61
4.3 Kebakaran Tahun 1997-1998	63
4.4 Tanggapan Pemerintah terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan	66
5. PROSPEK REFORMASI KEBIJAKAN KEHUTANAN	69
5.1 Konteks Kebijakan Kehutanan: Suatu Negara Dalam Keadaan Krisis	69
5.2 Kelumpuhan Politik di Pusat	70
5.3 Separatisme dan Tuntutan Desentralisasi di Beberapa Propinsi	71
5.4 Meluasnya Kekerasan Sipil serta Runtuhnya Hukum dan Peraturan	71
5.5 Berbagai Konflik Lahan dan Sumber Daya Hutan	73
	78

DAFTAR ISTILAH	80
DAFTAR PUSTAKA	82
CATATAN	84

Lampiran 1. Komentar mengenai Berbagai Kesulitan Data	89
Lampiran 2. Tabel	94
Lampiran 3. Sumber-sumber Data dan Catatan Teknis	98

DAFTAR GAMBAR

1.1. Kekayaan Biotik: Persentase Spesies yang Terdapat di Indonesia	2
2.1. Deforestasi Sejak Masa Prapertanian sampai tahun 1997	10
2.2. Perubahan Tutupan Hutan di Sumatera, 1900-2010	15
2.3. Perubahan Tutupan Hutan di Kalimantan, 1900-2010	15
2.4. Perubahan Tutupan Hutan di Sulawesi, 1900-2010	16
2.5. Alokasi Tata Guna Hutan dan Tutupan Hutan Aktual, tahun 1997	16
3.1. Proses Degradasi Hutan dan Deforestasi di Indonesia	27
3.2. Produksi dan Ekspor Kayu Bulat, 1961-1999	29
3.3. Produksi dan Ekspor Kayu Lapis, 1961-1999	29
3.4. Kawasan HPH di Lima Pulau Utama, 1985-1998	30
3.5. Produksi Kayu Bulat untuk Industri, 1980-2000	36
3.5.a. Produksi Kayu Bulat, 1980	36
3.5.b. Produksi Kayu Bulat, 1990	36
3.5.c. Produksi Kayu Bulat, 2000	36
3.6. Kapasitas Terpasang dan Produksi Industri Pulp, 1990-2001	39
3.7. Kapasitas Terpasang dan Produksi Industri Kertas & Karton, 1900-2001	39
3.8. Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Kayu, 1999 (Kapasitas total = 74 juta m ³)	40
3.9. Pertumbuhan Luas Perkebunan Kelapa Sawit, 1967-2000	50

DAFTAR TABEL

1.1. Ekspor-Ekspor Utama Indonesia, 1997	5
2.1. Tutupan Hutan Pada Tahun 1950 (hektar)	9
2.2. Kawasan Hutan dan Deforestasi, 1985-1997 (Perkiraan PI/Bank Dunia)	11
2.3. Kawasan Hutan dan Deforestasi, 1985-1997 (Perkiraan GFW)	12
2.4. Kehilangan Hutan Dataran Rendah di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, 1900-1997	14
2.5. Revisi Status Lahan Hutan Permanen Antara Tahun 1986 dan 2000	18
2.6. Hutan Alam, Hutan yang Sudah Terdegradasi, dan Kawasan yang Hutannya Sudah Gundul, Pertengahan 1990-an	19
3.1. Peringkat 10 Kelompok Besar Usaha Perakayuan Menurut Pemegang HPH, 1994/95 dan 1997/1998	31
3.2. Status dan Luas Kawasan HPH, yang Dilaporkan Pada Tahun 2000	32
3.3. Kondisi Hutan di 432 HPH yang Ada dan Habis Masa Berlakunya (Menurut Analisis Citra Landsat Tahun 1997-1999)	33
3.4. Pasokan Kayu dari Semua Sumber Legal (m ³)	38
3.5. Perkiraan Ketidakseimbangan Pasokan-Permintaan Kayu, 1997/1998	40
3.6. Alokasi dan Penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) sampai Desember 2000, Menurut Propinsi dan Tipe HTI	43
	44

3.8.	HPH yang Dikonversi Menjadi Konsesi HTI Sampai Tahun 1998 Menurut Propinsi (ha)	45
3.9.	Kepemilikan Lahan Oleh 10 Konglomerat Kelapa Sawit Terbesar, 1997	51
3.10.	Kesenjangan Antara Kawasan Hutan yang Ditentukan Untuk Konversi dan Pengajuan Untuk Konversi Hutan Menjadi Perkebunan	53
3.11.	Kawasan Hutan yang Diserahkan Untuk Pembangunan Lokasi Transmigrasi (sampai Tahun 1998)	59
4.1.	Perkiraan Kerusakan Kawasan yang Disebabkan oleh Kebakaran Hutan Tahun 1997-1998 (ha)	62
4.2.	Ringkasan Biaya Ekonomi Akibat Kebakaran Hutan dan Kabut yang Dihasilkannya tahun 1997-1998	63
4.3.	Berbagai Dampak Kesehatan Akibat Terpapar Kabut yang Terkait dengan Kebakaran Hutan di Delapan Propinsi di Indonesia, September-November 1997	66

DAFTAR BOKS

1.1.	Garis Wallace	6
2.1.	Dampak Penebangan Hutan Bagi Hutan-Hutan Dipterocarpaceae	13
2.2.	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Taman Nasional Gunung Leuser	21
2.2.	Sumber Data dan Berbagai Kesulitannya	23
3.1.	Praktik Ilegal yang Umum Dilakukan Perusahaan Kayu	34
3.2.	Apa yang Kami Maksud Dengan Pembalakan Ilegal?	37
3.3.	Pembalakan Ilegal: Sebuah Kisah Tentang Dua Taman Nasional	46
3.4.	Kasus Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Hutan Alam Produktif	48
3.5.	Lahan HPH yang Dimanfaatkan Secara Ilegal Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara	52
3.6.	Pembukaan Hutan Alam untuk Pembangunan Perkebunan di Pulau-Pulau Kecil: Kasus Pulau Wawonii, Propinsi Sulawesi Tenggara	54
3.7.	Transmigrasi dan Pembukaan Hutan	58
4.1.	Hubungan Kebakaran Hutan Dengan Perkebunan Kelapa Sawit: Mengapa Masyarakat Melakukan Pembakaran?	64
5.1.	Otonomi Daerah dan Pengelolaan Hutan	72
5.2.	Taman-taman Nasional dan Masyarakat Indijenus: Kerjasama atau Konflik? Dua Kasus dari Sulawesi	74
5.3.	Dua Belas Komitmen Indonesia Kepada CGI Mengenai Hutan dan Kebijakan Kehutanan	77

DAFTAR PETA

1.	Perubahan Tutupan Hutan Alam di Indonesia, 1985-1997	105
2.	Perubahan Tutupan Hutan Alam di Kalimantan, 1985-1997	106
3.	Kehilangan Hutan Dataran Rendah, Hutan Sub-Pegunungan, Hutan Pegunungan, 1985-1997	107
4.	Luas dan Distribusi Hutan Berakses Rendah dan Hutan Berakses Tinggi, 1997	108
5.	Fragmentasi Hutan Berakses Rendah dan Hutan Berakses Rendah Potensial	109
6.	Status Perlindungan Hutan Berakses Rendah dan Hutan Berakses Rendah Potensial	110
7.	Luas dan Distribusi Kawasan Lindung di Kalimantan	111
8.	Luas dan Distribusi Kawasan HPH	112
9.	Survey Terbatas tentang Kasus-kasus Pembalakan Ilegal yang Dilaporkan, 1997-1998	113
10.	Luas dan Distribusi Perkebunan di Sumatera	114
11.	Perkebunan dan HTI di Kawasan bekas HPH di Sumatera dan Kalimantan	115
12.	Jenis Pemanfaatan Hutan dan Kawasan yang Terbakar Tahun 1997-1998 di Kalimantan Timur	116
13.	Survey Terbatas tentang Konflik Sumber Daya Hutan yang Dilaporkan, 1997-1999	117

UCAPAN TERIMA KASIH

Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan berikut ini atas dukungan, kontribusi, dan berbagai komentar kajian yang telah mereka berikan untuk pembuatan laporan ini:

Rapat Pengkajian Internal, dilaksanakan di Wisma Bogor Permai, 27-28 April, 2001

Rina Agustine, Sekretariat Nasional FWI, Bogor; Wardiyono, CIFOR, Bogor; Restu Achmaliadi, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Bogor; Albertus T. Mulyono, FWI Simpul Bogor; Chehafudin, Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam, Yogyakarta; Dwi Prabowo YS, FWI Simpul Bogor; Hariadi Kartodiharjo, Fakultas Kehutanan, IPB/Bappedal, Bogor/Jakarta; Rajidt Ch. Malley, FWI Simpul Sumatera/Yayasan Leuser Lestari, Medan; Togu Manurung, Sekretariat Nasional FWI, Bogor; Lyndon B. Pangkali, FWI Simpul Papua, Jayapura; Christian Purba, FWI Simpul Bogor; Muhammad Ridwan, Sekretariat Nasional FWI, Bogor; A. Ruwindrijarto, Telapak Indonesia, Bogor; Lisken Situmorang, ICRAF, Bogor; Wishnu Tirta, FWI Simpul Bogor; Yasir Al Fatah, FWI Simpul Kalimantan, Banjarmasin; Muchlis L. Usman, Yayasan Cinta Alam/ FWI Simpul Sulawesi, Kendari.

Rapat Pengkajian oleh Pakar, dilaksanakan di Wisma Bogor Permai, 29-30 Juni 2001

Dian Agista, Birdlife-Indonesia Programme, Bogor; Rina Agustine, Sekretariat Nasional FWI, Bogor; Restu Achmaliadi, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Bogor; Albertus T. Mulyono, FWI Simpul Bogor; M. Ali Arsyad, Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta; Charles Victor (Chip) Barber, World Resources Institute, Manila; Chehafudin, Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam, Yogyakarta; Chrystanto, Pusat Perpetaan Badan Planologi Kehutanan, Departemen

Kehutanan, Jakarta; Wilistra Danny, Direktorat Penanggulangan Kebakaran, Departemen Kehutanan, Jakarta; Sadikin Djajapertjunda; Dwi Prabowo YS, FWI Simpul Bogor; Elfian Effendi, Natural Resource Management Program/EPIQ, Jakarta; Yasir Al Fatah, FWI Simpul Kalimantan, Banjarmasin; Hargyono, Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Ditjen BPK, Departemen Kehutanan, Jakarta; Bambang Hero Saharjo, Laboratorium Kebakaran Hutan, IPB, Bogor; Imam, Direktorat Perencanaan, Departemen Kehutanan, Jakarta; Rajidt Ch. Malley, FWI Simpul Sumatera/Yayasan Leuser Lestari-Medan; Togu Manurung, Sekretariat Nasional FWI, Bogor; Muhammad Yusram Massijaya, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor; Emily Matthews, Global Forest Watch/World Resources Institute, Washington, D.C.; Muayat Ali Muhsi, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan, Bogor; Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta; Rainny Natalia, FWI Simpul Bogor; Nuswanto, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, Jakarta; Lyndon B. Pangkali, FWI Simpul Papua, Jayapura; Christian Purba, FWI Simpul Bogor; Boen M. Purnama, Pusat Rencana Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta; Haryanto R. Putro, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor; Widodo S. Ramono, Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta; Muhammad Ridwan, Sekretariat Nasional FWI, Bogor; William M. Rombang, Birdlife-Indonesia Programme, Bogor; A. Ruwindrijarto, Telapak Indonesia, Bogor; Harry Santoso, Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Bogor; Iman Santoso, Proyek Inventarisasi dan Pemantauan Hutan, Departemen Kehutanan, Jakarta; William Sunderlin, CIFOR, Bogor; Jatna Supriatna, Conservation International-Indonesia Programme, Jakarta; Wishnu Tirta, FWI Simpul Bogor; Silverius Oscar Unggul, Yayasan Cinta Alam/ FWI Simpul Sulawesi, Kendari; Arbi Valentinus, FWI Simpul Bogor/Telapak, Bogor; Joko Waluyo, Sawit Watch/Walhi, Jakarta.

Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu memberikan data, komentar kritis mengenai data, dan berbagai saran yang sangat membantu dalam persiapan laporan ini. Kami tidak dapat menyebutkan pihak-pihak ini satu-persatu karena jumlah mereka sangat banyak, tetapi kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Derek Holmes, konsultan di Bank Dunia, dan kepada Neil Scotland, di DFID.

Tim Pengkaji Draft Akhir

Timothy H. Brown, Natural Resources Management Program, United States Agency for International Development, Jakarta; Dirk Bryant, World Resources Institute, Washington, D.C.; Tony Janetos, World Resources Institute, Washington, D.C.; Ralph Ridder, World Resources Institute, Washington, D.C.; Frances Seymour, World Resources Institute, Washington, D.C.; Nigel Sizer, The Nature Conservancy, Jakarta; William Sunderlin, CIFOR, Bogor; Dan Tunstall, World Resources Institute, Washington, D.C.; Thomas E. Walton, Bank Dunia, Jakarta.

Pendukung Dana

Global Forest Watch ingin mengucapkan terima kasih kepada para donor yang disebutkan berikut ini atas dukungan mereka secara keseluruhan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Global Forest Watch: AVINA, Department for International Development (DFID) UK, IKEA, Departemen Luar Negeri Kerajaan Belanda, Turner Foundation, dan World Resources Institute.

Forest Watch Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Natural Resources Management-EPIQ Program of the United States Agency for International Development (USAID), Komisi Belanda di World Conservation Union (NC-IUCN), Department for International Development (DFID) UK, atas dukungan dana yang telah diberikan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia. FWI juga ingin mengucapkan terima kasih kepada IKEA yang telah menyediakan dana bagi GFW untuk melakukan pemetaan hutan berakses rendah yang ada di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama. Bahkan sampai sekarang hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan penemuan species baru.

Namun demikian, suatu tragedi terus berlangsung di Indonesia. Sekarang Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena kalangan di dalam negeri dan masyarakat internasional begitu gusar menyaksikan perusakan sumber daya alam yang semena-mena di negeri ini. "Keajaiban ekonomi" Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an ternyata sebagian terjadi dengan menghancurkan lingkungan dan pelanggaran hak dan tradisi masyarakat lokal. Sebagai contoh, salah satu sektor perekonomian yang mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu industri pulp dan kertas, ternyata didirikan tanpa terlebih dahulu membangun hutan tanaman industri yang sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu pulp. Sebaliknya, berbagai pabrik pulp ini mengandalkan bahan bakunya dari pembukaan hutan alam secara besar-besaran. Perekonomian Indonesia dinodai dengan ketidaktaatan terhadap hukum dan korupsi. Pembalakan ilegal sudah berlangsung secara terang-terangan dalam volume yang sangat besar selama bertahun-tahun dan diyakini telah merusak hutan seluas 10 juta ha. Industri pengolahan kayu di Indonesia beroperasi di remang-remang sistem hukum yang aneh, dimana perusahaan-perusahaan besar yang –

sampai terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 – berhasil menarik penanaman modal miliaran dolar dari negara-negara Barat, ternyata mendapatkan lebih dari separuh pasokan bahan baku kayu dari sumber-sumber ilegal. Kayu secara rutin diselundupkan ke lintas perbatasan negara-negara tetangga, menyebabkan Pemerintah Indonesia kehilangan penerimaan jutaan dolar setiap tahun.

Sementara bukti-bukti terjadinya kerusakan sudah sedemikian banyak, namun gambaran tentang kerusakannya masih tetap kabur karena data yang ada saling bertentangan, informasi tidak tepat, dan klaim serta bantahan yang saling bertentangan. Oleh karena itu ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan penilaian yang obyektif terhadap situasi hutan Indonesia, yang akan menghasilkan basis informasi yang benar bagi setiap individu dan organisasi yang berupaya untuk melakukan perubahan yang positif.

Kesulitan mengenai data memang berat, tetapi laporan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Laporan ini menyajikan ringkasan yang komprehensif tentang skala dan laju perubahan yang mempengaruhi hutan-hutan Indonesia, dan berusaha untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan para pelaku yang menyebabkan terjadinya deforestasi. Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch telah mengumpulkan semua data resmi dan laporan terbaik yang tersedia dari kalangan pemerhati lingkungan di lapangan untuk menjawab berbagai pertanyaan berikut: Berapa banyak tutupan hutan yang masih tersisa di Indonesia dan berapa luas hutan yang telah hilang selama 50 tahun terakhir ini? Bagaimana kondisi hutan yang masih tersisa sekarang ini? Apa saja kekuatan-kekuatan utama yang menjadi penyebab deforestasi dan siapa para pelaku utamanya? Bagaimana prospek reformasi

kebijakan kehutanan sehubungan dengan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia pada saat ini?

Temuan-temuan kami ternyata tidak menyediakan dasar untuk menjadi optimis, meskipun sudah ada tanda-tanda perubahan di Indonesia. Donor-donor bilateral dan multilateral terbesar sekarang sedang aktif bekerja dengan Pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi dan rencana tindak untuk melakukan reformasi. Departemen Kehutanan Indonesia juga sudah memberikan komitmennya untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan spesifik di tingkat nasional, dan baru-baru ini juga telah mendukung rencana tingkat wilayah lintas negara untuk mengatasi pembalakan ilegal.

Namun demikian, meskipun reformasi-reformasi kebijakan yang sekarang berlangsung berhasil, jelas bahwa Indonesia berada dalam masa transisi, dari negara yang semula sangat kaya akan hutan menjadi negara yang miskin hutan, seperti yang dialami oleh Filipina dan Thailand. Jutaan hektar lahan yang dulu tertutup hutan sekarang dalam keadaan terdegradasi, berupa semak belukar dan dimana-mana ditumbuhi alang-alang. Dengan kehilangan hutan ini Indonesia kehilangan kekayaan keanekaragaman hayati, pasokan kayu, pendapatan, dan berbagai jasa lingkungan.

Lahan-lahan hutan yang sudah terdegradasi dapat ditanami kembali dan dikelola untuk menghasilkan kayu, komoditi perkebunan, buah-buahan dan hasil hutan non kayu lainnya. Berbagai jasa yang disediakan oleh ekosistem, seperti pengaturan air tawar dan pencegahan erosi tanah dapat dipulihkan. Bagian dari tragedi hutan Indonesia terjadi karena program pembangunan hutan tanaman industri pada saat ini, dan sistem konversi hutan untuk areal perkebunan, tidak memberikan kontribusi kepada pengelolaan hutan lestari, tetapi malahan ikut mempercepat

deforestasi. Secara resmi keputusan-keputusan dalam sektor kehutanan tidak lagi berorientasi pada pembukaan dan konversi hutan, namun dalam kenyataannya, pembukaan dan konversi hutan masih terus berlangsung. Sistem yang ada sekarang harus direstrukturisasi dengan mengharuskan pembangunan hutan tanaman industri dan perkebunan baru pada areal lahan yang sudah terdegradasi, yang sudah tersedia sangat luas untuk ditanami. Persyaratan ini harus ditegakkan.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, dimana sebagian besar basis sumber daya alamnya sudah hancur atau mengalami degradasi, tetapi yang tersisa masih banyak. Pembangunan lahan untuk hutan tanaman industri dan perkebunan, yang dapat memasok kayu dan hasil-hasil tanaman keras bernilai tinggi yang dapat diekspor, merupakan bagian penting dalam strategi ekonomi negeri ini. Dalam tahun-tahun yang akan datang, jalur yang lebih mudah ditempuh adalah membiarkan operasi pembalakan, hutan tanaman industri dan perkebunan – dan lahan-lahan terlantar yang ditinggalkan oleh kegiatan mereka ini – menyebar ke hutan-hutan alam yang masih tersisa sekarang, memberikan para pengembang rejeki nomplok yang sangat besar dari kegiatan penebangan dan konversi hutan, yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. Jalur perjalanan yang lebih sulit, tetapi yang pada akhirnya lebih berkelanjutan, adalah dengan cara memanfaatkan dan merehabilitasi lahan yang saat ini terlantar dan menganggur, dan melestarikan hutan-hutan primer yang masih tersisa. Dalam 50 tahun terakhir ini sudah 64 juta ha hutan yang ditebang. Tidak ada alasan secara ekonomi dan etika yang dapat membenarkan penebangan lebih lanjut terhadap 64 juta ha hutan dalam 50 tahun yang akan datang.

E.G. Togu Manurung, Ph.D.
Director
Forest Watch Indonesia

Jonathan Lash
President
World Resources Institute

POKOK-POKOK TEMUAN

Indonesia sedang mengalami kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia.

- Indonesia masih memiliki hutan yang lebat pada tahun 1950. Sekitar 40 persen dari luas hutan pada tahun 1950 ini telah ditebang dalam waktu 50 tahun berikutnya. Jika dibulatkan, tutupan hutan di Indonesia turun dari 162 juta ha menjadi 98 juta ha.
- Laju kehilangan hutan semakin meningkat. Pada tahun 1980-an laju kehilangan hutan di Indonesia rata-rata sekitar 1 juta ha per tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta ha per tahun pada tahun-tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi menjadi rata-rata 2 juta ha per tahun.
- Hutan-hutan tropis dataran rendah Indonesia yang memiliki persediaan kayu dan keanekaragaman yang paling tinggi, adalah yang memiliki resiko paling tinggi. Tipe hutan ini hampir seluruhnya lenyap di Sulawesi, dan diprediksikan akan lenyap di Sumatera pada tahun 2005 dan di Kalimantan pada tahun 2010, jika kecenderungan seperti saat ini terus berlangsung.
- Hampir setengah dari luas hutan di Indonesia sudah terfragmentasi oleh jaringan jalan, jalur akses lainnya, dan berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan perkebunan dan hutan tanaman industri.

Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.

- Konsesi-konsesi Hak Pengusahaan Hutan yang mencakup lebih dari setengah luas total hutan Indonesia diberikan oleh mantan Presiden Soeharto, kebanyakan diantaranya diberikan kepada sanak saudara dan para

pendukung politiknya. Kronisme di sektor kehutanan membuat para pengusaha kehutanan bebas beroperasi tanpa memperhatikan kelestarian produksi jangka panjang.

- Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan ekspor Indonesia, dan juga karena keberuntungan yang berpihak kepada perusahaan, paling sedikit 16 juta ha hutan alam telah disetujui untuk dikonversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan. Dalam banyak kasus, konversi bertentangan dengan persyaratan legal yang mengharuskan pembangunan hutan tanaman industri dan perkebunan hanya pada areal lahan yang telah mengalami degradasi, atau pada lahan hutan yang telah dialokasikan untuk konversi.
- Pengembangan industri pulp dan kertas yang sangat agresif di Indonesia dalam dekade terakhir ini telah menimbulkan tingkat permintaan terhadap serat kayu yang tidak dapat dipenuhi oleh rejim pengelolaan hutan di dalam negeri pada saat ini.
- Pembukaan hutan oleh para petani skala kecil juga cukup penting tetapi bukan merupakan penyebab utama deforestasi.

Pembalakan ilegal sudah mencapai tingkat epidemik sebagai akibat ketimpangan struktural antara permintaan dan pasokan kayu legal yang telah lama terjadi di Indonesia.

- Pembalakan ilegal, menurut definisi, tidak didokumentasikan secara akurat. Namun seorang mantan pejabat senior Departemen Kehutanan baru-baru ini menyatakan bahwa pencurian dan pembalakan ilegal telah merusak sekitar 10 juta hektar hutan-hutan Indonesia.
- Ekspansi secara besar-besaran pada sektor produksi kayu lapis dan pulp dan kertas selama dua puluh tahun terakhir ini menyebabkan permintaan terhadap bahan baku kayu pada saat ini jauh melebihi pasokan

legal. Kelebihannya sebanyak 35-40 juta meter kubik per tahun.

- Kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu legal ini dipenuhi dari pembalakan ilegal. Banyak industri pengolahan kayu secara terbuka mengakui ketergantungan mereka terhadap kayu yang ditebang secara ilegal. Jumlahnya mencapai sekitar 65 persen dari pasokan total pada tahun 2000.
- Penebangan hutan secara legal juga dilakukan pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Menurut statistik terkini dari Departemen Kehutanan, pasokan kayu legal yang berasal dari hutan alam produksi berkurang jumlahnya, yaitu dari 17 juta meter kubik pada tahun 1995 menjadi di bawah 8 juta meter kubik pada tahun 2000. Penurunan produksi kayu bulat ini sebagian ditutupi oleh produksi kayu yang diperoleh dari hutan-hutan yang dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan atau hutan tanaman industri. Tetapi sumber kayu tambahan ini sudah mencapai puncaknya pada tahun 1997.
- Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Dalam kenyataannya, jutaan hektar hutan alam Indonesia sudah ditebang habis untuk dijadikan hutan tanaman industri, dan dari semua lahan hutan yang telah dibuka tersebut sekitar 75 persen tidak pernah ditanami.

Lebih dari 20 juta hektar hutan sudah ditebang habis sejak tahun 1985 tetapi sebagian besar dari lahan ini belum pernah diolah menjadi alternatif penggunaan lahan yang produktif.

- Hampir 9 juta ha lahan, sebagian besar adalah hutan alam, telah dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Lahan ini kemungkinan telah ditebang habis atau dalam waktu dekat akan ditebang habis. Namun hanya sekitar 2 juta ha yang telah ditanami dengan jenis kayu yang cepat tumbuh, utamanya Acacia mangium, untuk menghasilkan kayu pulp. Implikasinya: 7 juta ha lahan yang sebelumnya hutan sekarang dalam keadaan terlantar.
- Hampir 7 juta ha hutan sudah disetujui untuk dikonversi menjadi perkebunan sampai akhir tahun 1997 dan hutan ini hampir dapat dipastikan telah ditebang habis. Tetapi lahan yang benar-benar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1985 hanya 2,6 juta ha, sementara perkebunan baru untuk tanaman keras lainnya kemungkinan luasnya mencapai 1-1,5 juta ha. Implikasinya: 3 juta ha lahan yang sebelumnya hutan sekarang dalam keadaan terlantar.
- Tidak ada perkiraan akurat yang tersedia mengenai luas hutan yang dibuka oleh para petani skala kecil sejak tahun 1985, namun ada perkiraan yang dapat dipercaya pada tahun 1990 yang menghitung luas hutan yang dibuka oleh para peladang berpindah adalah sekitar 20 persen dari total luas hutan yang hilang. Ini berarti sekitar 4 juta ha hutan telah ditebang habis antara tahun 1985 sampai 1997.
- Program transmigrasi untuk memindahkan penduduk Pulau Jawa yang sangat padat ke pulau-pulau lain di luar Jawa, antara tahun 1960-an sampai program ini berakhir pada tahun 1999, menyebabkan pembukaan hutan seluas 2 juta ha. Disamping itu, migrasi dan pemukiman ilegal oleh para petani pionir di sepanjang jalan operasi pembalakan HPH, dan bahkan di dalam beberapa Taman Nasional juga meningkat banyak sekali sejak tahun 1997. Namun demikian, perkiraan yang dapat dipercaya tentang luas lahan hutan yang telah dibuka oleh para petani pionir pada tingkat nasional belum pernah dilakukan.
- Para pemilik perkebunan skala besar banyak yang menggunakan api sebagai cara yang mudah dan murah untuk membuka hutan untuk lahan perkebunan mereka. Pembakaran hutan yang disengaja, yang dikombinasikan dengan keadaan kemarau panjang akibat pengaruh fenomena El Niño, telah menimbulkan kebakaran besar yang tidak dapat dikendalikan, dengan intensitas

dan luas kebakaran hutan yang terjadi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 5 juta ha hutan terbakar pada tahun 1994 dan sekitar 4,6 juta ha hutan lainnya juga terbakar pada tahun 1997-1998. Sebagian dari areal yang terbakar ini sekarang mengalami regenerasi menjadi semak belukar, sebagian telah dihuni oleh para petani skala kecil, namun upaya secara sistematis untuk memulihkan tutupan hutan atau memanfaatkannya sebagai lahan pertanian yang produktif masih belum banyak dilakukan.

Pemerintah Indonesia sekarang menghadapi banyak tekanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk segera mengambil tindakan, tetapi kemajuannya lambat dan tidak semua reformasi kebijakan yang terjadi merupakan kabar baik untuk memperbaiki kondisi hutan.

- Dalam suasana politik yang relatif lebih bebas setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, para aktivis lingkungan hidup menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dari pihak pemerintah dan sektor swasta. Akses terhadap informasi resmi sekarang semakin terbuka, namun usaha-usaha untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan perusahaan masih belum menunjukkan keberhasilan yang berarti.
- Banyak sekali masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan, yang merasakan semakin lemahnya kekuasaan pusat, melampiaskan kemarahan mereka kepada para pengelola HPH, perkebunan dan HTI karena mereka dipandang telah merusak dan menghancurkan sumber-sumber daya lokal. Masalah ketidakjelasan kepemilikan lahan yang sudah terlalu lama menjadi akar penyebab berbagai konflik tersebut. Pemerintah tidak lagi bersedia melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, namun pemerintah juga tidak punya usaha yang terkoordinasi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- Sejak tahun 1999, negara-negara donor utama Indonesia melakukan koordinasi bantuan mereka melalui suatu konsorsium yang disebut *Consultative Group on Indonesia* (CGI), yang diketuai oleh Bank Dunia. Pengelolaan hutan yang lebih baik telah dinyatakan sebagai suatu prioritas, dan pemerintah Indonesia telah memberikan komitmen yang berisi 12 pokok rencana reformasi kebijakan. Namun demikian, masalah kekacauan politik yang terus berlanjut tampaknya menyulitkan usaha-usaha untuk mengimplementasikan komitmen ini. Pada bulan April 2001, Menteri Kehutanan pada waktu itu mengakui bahwa ada banyak kegagalan dan ia menyatakan bahwa seharusnya Indonesia tidak menyetujui "target yang sangat tidak realistis itu". Sebagai sebuah contoh, Pemerintah memberlakukan moratorium konversi hutan alam pada bulan Mei 2000, tetapi larangan tersebut tidak dipatuhi di berbagai propinsi.
- Indonesia sekarang sedang bergerak cepat dalam pelaksanaan sistem baru yang disebut "otonomi daerah", tetapi pemerintahan kabupaten, penerima manfaat dari pelaksanaan desentralisasi, pada umumnya tidak memiliki kemampuan atau dana untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Prioritas tertinggi mereka adalah meningkatkan pendapatan asli daerah, dan intensifikasi eksploitasi sumber daya hutan sudah terjadi di banyak daerah.